

Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Identitas

Muhammad Nur Ilham*

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: muhnurilhamaf@gmail.com

Koresponden*

Darussalam Syamsuddin

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: darussalam7@gmail.com

Syahrir Karim

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: syahrirkarim@uin-alauddin.ac.id

Diterima: [2024-08-21]

Direvisi: [2024-10-07]

Disetujui: [2024-10-11]

Abstract

This research aims to determine Nurcholish Madjid's political thinking style. This research is library research or library study using a philosophical and historical approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Primary data sources in this research are books written directly by Nurcholish Madjid, as well as books that are relevant to the discussion, while secondary data in this research are relevant literature materials that discuss identity politics. The data collection method in this research uses direct quotation and indirect quotation methods. The data analysis technique used in this research is content analysis technique. The research results show that Nurcholish Madjid's political thinking style is characterized by inclusiveness, pluralism and universal Islamic values. Madjid believes that Islamic values should be applied in social life without linking them to religious-based political parties. He also advocates democracy, human rights, and education that emphasizes tolerance and pluralism. Background to the emergence of the

jargon "Islam yes, Islamic parties no". This is a concern. He believes that Islamic political parties tend to divide society and are used for short-term political interests by elites. According to Nurcholish Madjid, the relevance of the jargon "Islam Yes, Islamic Party No" to the phenomenon of identity politics in Indonesia is very significant. This jargon teaches the importance of pluralism and inclusiveness in politics, so that it can reduce polarization and sectarianism in society.

Keywords: *Thought Analysis, Nurcholish Madjid, Identity Politics.*

PENDAHULUAN

Politik identitas adalah suatu pendekatan politik yang memanfaatkan identitas kelompok tertentu, seperti etnis, suku, agama, gender, atau orientasi seksual, sebagai basis untuk memobilisasi dukungan politik. Identitas-identitas ini kemudian dipolitisasi untuk mencapai tujuan politik tertentu, baik itu untuk mendapatkan kekuasaan, melindungi kepentingan kelompok, atau menciptakan perubahan sosial.¹ Stigma politik identitas berawal dari perbedaan pemahaman dalam memahami suatu konsep dan menempatkan konteks. Konteks misalnya membahas ruang, waktu, dan kondisi yang melatari. Uraian mengenai politik identitas di Indonesia tidak terlepas dari makna identitas itu sendiri.² Mengartikan identitas atau jati diri sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu.

Kasus pilkada DKI Jakarta tahun 2016 telah menjadi fenomena dan menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya publik DKI Jakarta tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Munculnya kasus Q.S Al-Maidah (5): 51.³ Oleh salah satu pasangan calon hingga memunculkan aksi damai 212 di Jakarta, menjadi bagian yang sangat fenomenal. Fenomena pilkada DKI Jakarta dikonstruksi sebagai narasi politik oleh kelompok elit politik tertentu sebagai wacana instrument untuk menggambarkan ketakutan kalah pada pihak lawan politiknya, sehingga mampu meruntuhkan citra dan menyudutkan figur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi menang, kemudian mampu

¹ Ari Ganjar Herdiansah, "Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 2 (2017): 169–183.

² Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Dan Bangsa* (Jakarta: KIK Press, 2004).

³ Endang Sari, "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta," *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 2 (2016): 145–156.

mengalahkan lawan lainnya sehingga perlu disudutkan dengan berbagai macam narasi.

Isu yang digunakan dalam narasi salah satunya larangan memilih pemimpin non-Muslim Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2017, Basuki Tjahya Purnama, yang akrab disapa Ahok, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo, yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014.⁴ Penggunaan simbol agama dalam pilkada DKI Jakarta menjadi pembangkit atas faktor terpilihnya Anis Baswedan terhadap lawannya, kemudian berlanjut ke Aksi Bela Islam Jilid 2, yang sering dikenal sebagai 212, yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 2017. Dengan jutaan pengikut, aksi ini merupakan aksi terbesar yang pernah ada. Aksi-aksi protes berikutnya terus berlanjut hingga suara Ahok-Djarot runtuh akibat Aksi 505, kasus penistaan agama. Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua.

Narasi agama pernah juga terjadi pada Megawati dengan isu perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Amien Rais yang merupakan Pada awalnya, Ketua Umum PAN melihat Megawati sebagai seorang pembaharu. Namun, di tengah jalan ia membentuk Poros Tengah. Partai-partai Islam termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan (sekarang PKS) membentuk Poros Tengah. Penolakan mereka terhadap Megawati sebagai presiden didasarkan pada gender. Gus Dur, presiden Poros Tengah, berhasil mengalahkan Megawati. Megawati mendapatkan 313 suara, sementara Gus Dur mengumpulkan 373 suara.⁵

Nurcholish Madjid, atau yang akrab disapa Cak Nur, adalah sosok penting dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang intelektual muslim yang gigih memperjuangkan modernisasi Islam dan dialog antaragama. Lahir pada 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, Cak Nur sejak kecil telah menunjukkan minat yang besar terhadap agama dan ilmu pengetahuan.⁶ Pendidikan awalnya ditempuh di Pondok Modern Darussalam

⁴ Fariz Mahadika and Nur Hidayat Sardini, "Radikalisasi Isu Agama Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017," *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 4 (2019): 131–140.

⁵ Desy Ratnasari, Hana Panggabean, and Rustono Farady Marta, "Persepsi Kesetaraan Jender Terhadap Perempuan Anggota DPR Pada Jabatan Strategis Di DPR," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 14, no. 1 (2021): 33–60.

⁶ Johan Setiawan, "Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama Dalam Konteks Keindonesiaan," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2019): 21–38.

Gontor, sebuah pesantren yang terkenal dengan kurikulum modernnya. Setelah lulus, Cak Nur melanjutkan studinya di bidang ilmu politik di Universitas Chicago, Amerika Serikat.⁷

Kembali ke Indonesia, Cak Nur aktif terlibat dalam berbagai kegiatan intelektual dan sosial. Pemikirannya yang moderat dan terbuka membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh di kalangan umat Islam Indonesia. Berikut adalah beberapa pemikiran utama Cak Nur. *Pertama*, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Cak Nur menekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam, menurutnya, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia dan alam. *Kedua*, dialog antaragama. Cak Nur sangat mendorong dialog antaragama sebagai upaya untuk membangun toleransi dan persaudaraan di antara umat beragama. *Ketiga*, modernisasi Islam. Cak Nur percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan modernitas. Justru, Islam dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan peradaban modern.⁸

Gagasan yang disodorkan Nurcholish Madjid pada tahun 1970 menyampaikan pidato “Perlunya Pembaharuan Islam dan Masalah Integrasi Ummat”, adalah kegelisahan intelektualnya atas kebuntuan proses berpikir umat Islam Indonesia dan menurunnya kemampuan mereka dalam melakukan terobosan psikologis dalam perjuangannya. Dia mengamati stagnasi dalam ketidakmampuan umat Islam untuk membedakan antara objek-objek temporal dan transenden. Faktanya, umat Islam terkadang mengubah cita-cita transenden menjadi cita-cita duniawi dan sebaliknya.⁹ Maka solusi yang menjadi jalan keluar kebuntuan tersebut adalah upaya pembaruan stigma masyarakat.

Nurcholish Madjid merekomendasikan agar kecenderungan ideologi partai segera diubah, bukan terus ke arah yang sama. Gagasan tentang Negara Islam, partai-partai Islam, dan institusi-institusi sakral namun profan lainnya dikritik, begitu juga dengan kecenderungan para pemimpin Muslim pada masa itu.¹⁰ Nurcholish Madjid percaya bahwa Allah adalah Yang Maha Mutlak dan bahwa baik ISIS, partai Islam, maupun filosofinya tidak suci karena Al-Quran

⁷ Zaen Musyirifin, “Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam,” *Madaniyah* 6, no. 2 (2016): 315–326.

⁸ Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, “Cak Nur: Intelektual Cerdas Indonesia (Studi Biografi),” *At-Ta'fikir* 14, no. 1 (2021): 99–105.

⁹ Bahtiar Effendi, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Politik Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).

¹⁰ Jun Mawalidin Jun, “Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 66–85.

tidak memerintahkan pendirian organisasi semacam itu. Dia kemudian menganjurkan “Islam ya, partai Islam tidak,” sebuah slogan yang dirancang untuk menginspirasi umat Islam untuk memfokuskan pengabdian mereka pada prinsip-prinsip Islam daripada organisasi meskipun mereka menggunakan nama Islam. Penentangan Nurcholish Madjid terhadap struktur partai Islam patut dimaknai sebagai ketidaksepakatan terhadap penerapan Islam oleh orang-orang yang aktif di partai politik Islam, bukan sebagai penolakan terhadap Islam itu sendiri. Tingkah laku politik dan pemanfaatan Islam seperti itu pada gilirannya justru menjatuhkan nilai-nilai ajaran Islam sebenarnya.¹¹

Jargon “Islam yes, partai Islam no” merupakan salah satu gagasan yang sering menjadi kritik tersebut menjadi istilah ide sekularisasi. Menurut para pengkritiknya bahwa ide tersebut dapat menjadi hal yang berbahaya bagi akidah umat Islam karena merupakan gagasan yang berasal dari Barat.¹² Namun sekularisasi menurut Nurcholish tidak demikian. beliau mengatakan bahwa sekularisasi tidaklah bermaksud sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslim menjadi sekularis. Namun ini dimaksudkan agar umat Islam menduaniawikan hal-hal yang mestinya bersifat duniawi dan melepaskan kecenderungan untuk mengukhrawikan-nya.¹³

Berikut ialah penelitian-penelitian yang relevan dengan riset ini. *Pertama*, Idzam Fautanu, M. Buhori, and Heri Gunawan dengan judul penelitian “Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa identitas politik masyarakat Muslim DKI Jakarta didasarkan pada agama dan, secara umum, merupakan komponen penting dari budaya politik. Identitas politik masyarakat Muslim DKI Jakarta sebagian besar didasarkan pada elemen budaya dan agama dan mengambil bentuk ukhuwah Islamiyah. Hal ini terwujud dalam bentuk aktivisme untuk memastikan keberhasilan kampanye, menggalang komunitas Muslim untuk politik identitas, dan mendukung kemenangan pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.¹⁴

¹¹ Aminudin, *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia: Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹² Budi Prayetno, “Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid,” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, no. 2 (2017): 1–14.

¹³ Madjid Nurcholish, *Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008).

¹⁴ Fautanu, Buhori, and Gunawan, “Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid.”

Kedua, Suwandi, Ervina Suwandi, Auliyah Shafira Azzahra Syamsul, Khair Tasnim Razak Naba, dan Kurniati dengan judul riset "Etika Politik Islam Dalam Pemikiran Nurcholis Majid". Temuan penelitian menunjukkan bahwa Nurcholish Majid bermaksud untuk menghilangkan kesalahpahaman bahwa Islam politik adalah pembangkang atau menentang negara. Lebih jauh lagi, hal ini menunjukkan bahwa Islam, khususnya dalam perspektif Nurcholis, harus lebih tegas dalam kepatuhannya pada prinsip-prinsip moral Islam dalam segala bentuk pemerintahan. Untuk itu, para peneliti mengajukan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan evaluasi perspektif Nurcholis tentang etika politik Islam dan menguraikan bagaimana prinsip-prinsip etika Islam dipraktikkan.¹⁵

Begitu menariknya menelaah pemikiran Nurcholish Madjid yang sebenarnya kontroversial waktu itu, beliau sebagai pencetus gerbong pembaruan yang kemudian hari meruntuhkan mitos pembangkangan politik Islam.¹⁶ Dalam hal ini Politik Islam untuk waktu yang agak lama, memang pernah menjadi sasaran kecurigaan politis dan ideologis. Masa-masa itu ditandai dengan wacana politik, yang sering mangasosiasikan politik Islam dengan gerakan ekstrim kanan. Persepsi yang ingin dimunculkan adalah bahwa Islam secara politis dan ideologis merupakan ancaman atas gagasan negara-bangsa dan pancasila sebagai dasarnya.¹⁷

Sejak meluncurkan gagasan sekularisasinya pada 1970-an itulah sebagai intelektual, pemikiran Nurcholish banyak dikaji dan dibahas dalam konteks hubungan dan dinamika keislaman dan keindonesiaan. Beliau bahkan dijuluki sebagai "lokomotif kaum pembaharu" yang dimasukkan ke dalam aliran neo-modernis Islam bersama Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Jalaluddin Rahmat, dan lainnya.¹⁸

Beranjak dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik meneliti "Telaah Politik Nurcholish Madjid Terhadap Politik Identitas". Pemikiran Nurcholish Madjid dalam ungkapannya "Islam yes, partai Islam no" merupakan faktor yang melahirkan atau setting sosial dan politik yang melingkupinya. Kemudian meneropong keterkaitan politik identitas dalam

¹⁵ Ervina Suwandi et al., "Etika Politik Islam Dalam Pemikiran Nurcholis Majid," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024): 175–181.

¹⁶ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri Abdul Munir Mulkhan* (Yogyakarta: Sypress, 1999).

¹⁷ Bahtiar Effendy, *(Re)Politikasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000).

¹⁸ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Republika, 2004).

jargonnya dewasa ini. Tulisan ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui corak pemikiran politik Nurcholish Madjid, 2) Memahami keadaan politik identitas di Indonesia, dan 3) Menganalisis relevansi jargon Islam yes, partai islam no dengan fenomena politik identitas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena data yang diteliti berupa naskah-naskah atau buku-buku, atau majalah–majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Metode penelitian studi pustaka adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber bacaan ini bisa berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber-sumber lainnya yang dapat diakses baik secara *online* maupun *offline*.¹⁹ Berikut adalah Langkah-langkahnya. *Pertama*, menentukan topik penelitian. *Kedua*, merumuskan pertanyaan penelitian. *Ketiga*, mencari sumber pustaka. *Keempat*, membaca dan menganalisis sumber. *Kelima*, menyusun hasil penelitian.

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan historis. Pendekatan filosofis adalah sebuah cara pandang atau metode dalam meneliti suatu fenomena atau konsep dengan menggunakan kerangka berpikir filosofis. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep dasar, asumsi, dan nilai-nilai yang mendasari fenomena tersebut.²⁰ Adapun pendekatan historis ialah penelaahan dokumen serta sumber-sumber lain yang mengandung informasi terdahulu dan dilaksanakan secara sistematis, dengan mempelajari sesuatu yang lampau agar dapat memahami keadaan, praktik pendidikan dengan lebih baik dan selanjutnya dapat memecahkan permasalahan yang timbul dengan berdasarkan pada pengalaman yang lama.²¹

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan objek riset. Jadi, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh Nurcholish Madjid dan buku yang relevan

¹⁹ Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2020).

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

dengan pembahasan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu karya ilmiah atau bahan pustaka yang membahas tentang gagasan dan teori Nurcholish Madjid.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik analisis isi atau konten. Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi suatu pesan dengan menganalisis dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh tokoh, baik melalui tulisan atau pesan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. Dalam upaya menampilkan analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, pendekatan sistematis, dan generalisasi, kemudian analisis harus berdasarkan aturan yang dirumuskan secara eksplisit.²²

PEMBAHASAN

A. Corak Pemikiran Politik Nurcholish Madjid

Secara umum masyarakat Islam tidak melihat kaitan antara agama dan urusan politik. Salah satu penjelasan mengenai hal ini adalah kurangnya kesadaran mengenai sejauh mana keyakinan Islam sebenarnya. Banyak orang, termasuk umat Islam sendiri, tidak menyadari bahwa Islam lebih dari sekedar agama; ia juga merupakan masyarakat yang berbeda dengan keyakinan, tujuan, dan kepentingan politiknya sendiri (ummah). Meski banyak umat Islam yang tidak menyadari bahwa Islam juga merupakan suatu kolektivitas, mereka hanya memandang Islam sebagai agama individual. Islam adalah sebuah kolektivitas yang memiliki kesadaran, struktur, dan kemampuan untuk bekerja sama.

Terkait politik Islam, Cak Nur mengidentifikasi tiga persoalan utama yang perlu diatasi oleh umat Islam. *Pertama*, diperlukan pendekatan yang lebih canggih dalam memahami ajaran Islam agar tidak terjebak pada penafsiran Islam yang konvensional, yaitu gagasan sekularisasi, yang menurutnya tidak sama dengan gagasan sekularisme. *Kedua*, diperlukan gaya berpikir yang lebih bebas agar umat Islam tidak lagi dibatasi oleh ajaran teologis yang menghalangi mereka dalam menerapkan kecerdasan politik mereka. *Ketiga*, perlunya memiliki pola pikir progresif dan lebih menerima individu yang berbeda.

Nurcholis Madjid menjelaskan, Islam bukanlah sebuah ideologi atau teori dalam artian ideologi. Ia mengatakan, dari sisi politik, Islam berada pada posisi yang mendukung syariah dan lebih mendekati filsafat yang memiliki

²² Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*.

dinamika dan karakter tersendiri.²³ Nurcholish Madjid secara konsisten menyoroti pentingnya menemukan titik temu di antara semua agama. Menolak universalitas budaya manusia hanya akan membatasi Islam, yang merupakan cara hidup bagi sebagian besar penduduk. Mempertahankan inklusivitas Islam sangat penting bagi kelestarian hidupnya. Hal ini disebabkan oleh keyakinan Nurcholis Madjid bahwa institusi politik Islam adalah satu-satunya tempat di mana inklusivitas Islam dapat benar-benar diterapkan. "Islam Yes, Partai Politik Islam No" adalah slogan Nurcholis yang terkenal.²⁴

Khazanah keilmuan memiliki banyak sekali hasil perenungan Cak Nur. Memang, ide-ide Cak Nur sangat relevan dengan lingkungan sosial di mana para pemain politik beroperasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku elit politik. Cak Nur tampaknya telah mengabaikan Partai Islam dalam karya keduanya, "Islam Doktrin dan Peradaban". Penting untuk mengkritisi filosofi politik Cak Nur sekali lagi. Meskipun Cak Nur memang mengadopsi beberapa etika politik Nabi dan para sahabatnya, namun hanya terbatas pada prinsip-prinsipnya saja. Oleh karena itu, jika filsafat politik Cak Nur dipahami dalam konteks politik Islam dan struktur sosial Islam lainnya yang merupakan komponen syariah (al-ahkam al-'amaliah) dalam tradisi keilmuan Islam, maka akan menjadi sangat lemah. Hal ini juga karena Cak Nur hanya mencurahkan sebagian kecil saja, baik dari segi durasi maupun cakupannya. Perjanjian di antara para pihak untuk mewujudkan politik bersama, yang dikenal oleh Cak Nur sebagai perjanjian Nuktah-Nuktah, adalah Piagam Madinah.

Poin-poin yang diangkat oleh Cak Nur, bagaimanapun, hanya berkaitan dengan etika dan nilai-nilai. Periode Madinah ditandai dengan dominasi hukum syariah, yang mengembalikan beberapa prinsip Piagam Madinah, termasuk kesetaraan penuh antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dimungkinkan oleh status kelompok Yahudi yang kemudian menjadi dzimmi, atau non-Muslim yang dilindungi, dengan hak dan kewajiban yang sama dengan Muslim.

Menurut Nurcholish Madjid, cita-cita universal Islam sering direduksi menjadi senjata politik yang berguna ketika identitas Islam digunakan dalam politik. Konflik dan eksklusivisme kelompok dapat terjadi akibat hal ini. Ia menggarisbawahi bahwa Islam lebih dari sekadar identitas politik yang

²³ Faridi, *Agama Jalan Kedamaian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

²⁴ Qidsy Cikal Renjana, "Falsafat Multikulturalisme Cak Nur" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

terbatas; Islam juga merupakan sumber dari cita-cita moral dan etika yang universal.²⁵

Politik identitas, menurut Madjid, sering kali mempolarisasi masyarakat dan membatasi ruang demokrasi. Hal ini dapat memperburuk sektarianisme dan mengikis kohesivitas masyarakat. Ia memperingatkan bahwa alih-alih melayani kepentingan masyarakat umum, politik identitas dapat digunakan oleh para elit politik untuk mengendalikan rakyat dan memperkuat otoritas mereka sendiri.

Madjid menyoroti nilai inklusivitas dan pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, ia mempromosikan komunikasi antar agama dan antar budaya. Ia berpendapat bahwa identitas nasional yang beragama dan inklusif lebih penting daripada identitas nasional yang terbatas pada agama atau kelompok etnis tertentu. Menurut Madjid, solusi untuk masalah politik identitas terletak pada pendidikan yang efektif dan perubahan politik yang didasarkan pada keadilan sosial dan prinsip-prinsip demokrasi. Dia adalah pendukung pendidikan yang menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia, pluralitas, dan toleransi.²⁶

B. Politik Identitas sebagai Taktik Politik di Indonesia

Banyak yang mengkritik salah satu teori Nurcholish Madjid tentang Islam politik. Cak Nur mengklaim bahwa ia tidak berniat untuk menyatukan agama dan politik. Dia percaya bahwa jika negara dan agama dipisahkan, tidak akan ada percampuran kepentingan. Proses pemisahan ini diperlukan karena umat Islam secara historis tidak dapat membedakan antara tujuan Islam yang bersifat temporal dan transendental. Umat Islam perlu melakukan banyak upaya untuk membuat universalisme Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan politik harus dipahami sebagai proses evolusi yang membebaskan. Fungsi mereka sebagai khalifah Allah di bumi juga terkait dengan hal ini.²⁷

Pemisahan antara negara dan agama tidak pernah dimaksudkan untuk membasmi tradisi politik Muslim atau para pemikir politik Muslim.

²⁵ Ulfa Masamah, "Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, Dan Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia," *Fikrah* 4, no. 1 (2016): 1–19.

²⁶ Khairil Anwar, *Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2023).

²⁷ Muhammad Supawi and Arifinsyah Arifinsyah, "Makna Kalimatun Sawa Terhadap Relevansi Wacana Inklusivisme Agama Dan Realitas Peradaban Manusia, Butir Pemikiran Nurcholish Madjid," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 1 (2024): 414–429.

Sebaliknya, hal ini dimaksudkan untuk membebaskan agama dari semua kepentingan duniawi dan kecenderungan Muslim untuk mengislamkannya. Di sini, agama hanya berfungsi sebagai alat politik. Akibatnya, umat Islam ditentukan oleh kesiapan mental mereka untuk terus-menerus memeriksa kebenaran suatu nilai berdasarkan fakta-fakta moral, material, atau historis.²⁸

Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa politik identitas pada dasarnya adalah sebuah metode untuk menjalankan politik berdasarkan identitas bersama; di Indonesia, politik identitas sering kali dibagi menjadi dua kubu: nasionalis dan agamis. Saya tidak akan membahas mengapa politik identitas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori di atas, namun saya akan membahas bagaimana politik identitas mempengaruhi negara dan bangsa kita. Politik identitas menawarkan banyak ruang untuk pengembangan oposisi dan keseimbangan dalam proses demokrasi suatu negara. Stabilitas negara akan hancur jika tidak ditangani dengan bijaksana dan cerdas.²⁹

Jika pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui mediasi, benturan antara dua identitas ini dapat menimbulkan bahaya bagi stabilitas negara. Karena politik identitas, sebagai politik perbedaan, menjadi ancaman bagi keberhasilan sistem demokrasi yang sudah mapan, bukan hanya kepentingan politik tetapi juga kepentingan masyarakat luas yang dipertaruhkan. Sebagai contoh, negara Indonesia mampu melawan penjajah karena dibangun di atas semangat kebersamaan yang membuat kita bersatu di masa penjajahan. Namun, jika politik identitas tidak ditangani dengan baik, politik identitas akan memecah belah masyarakat, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI. Hingga saat ini, ranah sosial dan budaya masyarakat serta kehidupan politiknya menjadi semakin tersegregasi dan terpisah-pisah. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka stabilitas negara akan hancur. Hal ini sangat disesalkan karena perbedaan yang sebelumnya merupakan sumber kekuatan sekarang menjadi alat untuk menghancurkan negara secara keseluruhan. Hanya ada satu dialog yang harus diselesaikan. Berbicara dengan orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana mereka bertindak dan mengambil keputusan. karena dikatakan bahwa nasionalisme dan agama tidak cocok. Menurut K.H. Hasyim Asy'ari, nasionalisme dan agama adalah dua

²⁸ Vicky Izza El Rahma, "Sekular, Tradisionalis, Dan Modernis: Sejarah, Karakteristik, Dan Refleksinya Di Indonesia," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 8, no. 1 (2017): 56–74.

²⁹ Taufik Yusuf and Miftahul Hidayah, "Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024," *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 267–283.

kutub yang tidak saling bertentangan. Agama dan nasionalisme saling melengkapi satu sama lain.

C. Relevansi “Islam Yes, Partai Islam No” Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Identitas

Partai politik yang bermotif agama, menurut pendapat Nurcholish Madjid, sering kali menumbuhkan eksklusivisme dan mendorong perpecahan dalam masyarakat. Hal ini dapat memperburuk sektarianisme dan memicu perselisihan antara berbagai sekte agama. Beliau mengeluarkan peringatan, mengatakan bahwa politik identitas berbasis agama dapat mengabaikan kepentingan nasional demi keuntungan politik jangka pendek.

Partai-partai Islam yang dipandang Cak Nur sebagai strukturalis, legalistik, dan formalistik mengecewakannya. Oleh karena itu, Cak Nur menyatakan bahwa perjuangannya adalah membawa cita-cita Islam ke dalam sosiokultural masyarakat, bukan domain kelompok-kelompok Islam. Lebih jauh lagi, umat Islam lebih mahir dalam menentang sambil memperoleh kekuatan, maka Islam sebagai agama tidak akan gagal. Cak Nur dengan tegas menolak keberadaan partai Islam.

Jelas bahwa gagasan-gagasan ini sudah ketinggalan zaman jika partai-partai Islam berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan ide-ide yang didasarkan pada Islam. Karena konsep-konsep ini saat ini kehilangan dinamikanya, menjadi absolut, dan menjadi fosil. Pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya dan partai-partai Islam yang saat ini berkuasa telah gagal menumbuhkan citra yang baik dan penuh pengertian. Sebagai contoh, jumlah umat Islam yang melakukan korupsi meningkat. Menjadikan Islam sebagai filosofi politik adalah sesuatu yang ditentang oleh Madjid. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menggunakan teknik-teknik kultural untuk mengubah budaya yang ada saat ini dan menjadikannya lebih Islami.³⁰

Partai-partai Islam, seperti yang diketahui semua orang, muncul setelah Indonesia merdeka. Beberapa dari partai-partai ini kalah dalam pemilihan umum pada tahun 1955. Partai-partai ini akhirnya digabungkan ke dalam PPP selama rezim Suharto. Partai-partai nasionalis terus menang melawan partai-partai Islam bahkan setelah pintu reformasi dibuka. Dengan Pancasila sebagai doktrin partai mereka, PKB dan PAN berada dalam posisi yang lebih kuat. Meskipun Muhammadiyah dan NU sama-sama diuntungkan karena memiliki

³⁰ Ridho Al-Hamdi et al., *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan* (Yogyakarta: UMY Press, 2019).

basis massa yang cukup besar, keterbukaan kedua partai ini dalam merangkul keragaman Indonesia ditunjukkan dengan adopsi doktrin Pancasila.³¹

Namun, ia percaya bahwa Partai Golkar harus terus ada karena akan memutus ikatan antara lulusan HMI yang menduduki kursi DPR. Di sisi lain, penelusuran terhadap sejarah politik Rasul menunjukkan bahwa Rasul berpolitik secara struktural dan kultural. Dengan demikian, hal itu dapat ditegaskan. Di manakah letak identitas Islam jika Islam semata-mata dilihat sebagai seperangkat nilai budaya? Sementara Islam telah digambarkan sebagai agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan sejak awal, para ahli hukum dan cendekiawan Islam telah mendefinisikan Islam sebagai akhlaq (perilaku manusia terhadap Tuhan dan orang lain), syariat (ibadah), dan aqidah (keimanan atau kepercayaan).³²

Ada yang berpendapat bahwa Islam sudah ada sejak zaman Nabi. Benar, Islam dan Politik. Gagasan politik yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid di atas tidak ada kaitannya dengan pemahaman politik yang diwujudkan oleh Nabi Muhammad. Latar belakang sejarah menjelaskan bahwa Madinah adalah sebuah negara Indonesia, karena keduanya adalah negara yang beragam. Pada kenyataannya, banyak suku yang menganut sistem politik, meskipun sistem itu dipaksakan secara struktural dan kultural. Dengan demikian, partai Islam dan umat Islam terlibat dalam perjuangan untuk menanamkan cita-cita Islam.³³

Selain itu, tampaknya Cak Nur tidak memiliki keberanian untuk menerima partai Islam karena pada saat itu ia takut dengan kekuasaan Soeharto. Dia memiliki cengkeraman yang kuat pada tahun 1970-an. Lebih jauh lagi, sangat menggelikan ketika dia mengklaim bahwa kegagalan Partai Islam disebabkan oleh lambang Islam, melainkan umat Islam dalam politik yang harus diserang.

Dalam tradisi keilmuan Islam, teori politik terkait erat dengan ilmu peraturan agama, atau ilmu siyasah syari'ah, dan peraturan negara, yang juga dikenal sebagai fiqh siyasah. Hal ini mengimplikasikan bahwa membahas

³¹ Jihan Amalia Syahidah, *Hukum Pemilu Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia* (Jakarta: Duta Media Publishing, n.d.).

³² Safari Daud, *Re-Orientasi Politik NU Pada Masa Orde Baru: Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998* (Lampung: Pusaka Media, 2021).

³³ Askar Nur and Zulkifli Makmur, "Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam: Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani," *Jurnal Khitah* 1, no. 1 (2020): 1–25.

pemikiran politik Islam secara keseluruhan akan membutuhkan pembahasan beberapa topik yang berhubungan dengan syariah.

Karena berusaha menerapkan ajaran Islam secara penuh sesuai dengan proses santrinisasi dalam budaya Indonesia, pemikiran Cak Nur juga kehilangan esensi ideologisnya. Tentu saja, hal ini membutuhkan dukungan legislasi atau kebijakan negara. Tujuan umat dalam hal subatansi, atau strategi untuk mencapai tujuan mereka, dalam keadaan seperti ini. tidak hanya secara kultural, tetapi juga secara struktural.

Kecenderungan tujuan ini ditunjukkan oleh kebangkitan partai-partai Islam di era reformasi, terlepas dari apakah mereka mengadopsi doktrin Islam secara resmi atau tidak. Perspektif ini telah bertahan dalam peradaban Islam di seluruh dunia karena, menurut doktrin Islam, negara dan Islam terkait erat. Negara dan agama saling bergantung satu sama lain; keduanya tidak sama, tetapi berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, Islam dipandang sebagai cara hidup yang komprehensif yang mencakup kerangka kerja politik, sosial, spiritual, dan ekonomi.³⁴ Oleh karena itu, dalam konteks politik identitas Indonesia, konsep Cak Nur tentang “Islam Yes, Partai Islam No” sangat relevan. Pandangan ini dapat mengurangi perpecahan dan sektarianisme dalam masyarakat dengan menyoroti cita-cita universal Islam tanpa mengaitkannya dengan salah satu partai politik. Hal ini berkontribusi pada pengembangan lingkungan politik yang lebih ramah dan berbasis luas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Nurcholish Madjid adalah seorang intelektual muslim Indonesia yang memiliki pandangan yang cukup mendalam mengenai berbagai isu, termasuk politik identitas. Ia melihat bahwa politik identitas memiliki potensi yang baik maupun buruk.

Pada salah satu sisi, Nurcholish Madjid mengakui bahwa identitas, termasuk identitas agama, adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Identitas ini dapat menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi suatu kelompok. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa politik identitas dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, seperti memanipulasi massa atau menciptakan perpecahan. Ketika identitas dipolitisasi secara berlebihan, dapat memicu konflik dan menghambat pembangunan. Di sisi lain, Nurcholish Madjid menekankan pentingnya moderasi dalam beragama dan berbangsa. Ia

³⁴ Ana Sabhana Azmy and Amri Yusra, “Pandangan Politik Jaringan Islam Liberal Di Indonesia,” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 1, no. 2 (2020): 145–174.

mengajak umat Islam untuk tidak terjebak dalam fanatisme sempit dan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Menurut beliau, Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan keadilan yang dapat menjadi perekat persatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam berpolitik, umat Islam harus mampu memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan politik, serta menghindari penggunaan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Dengan demikian, Nurcholish Madjid memiliki pandangan yang kompleks terhadap politik identitas. Beliau mengakui pentingnya identitas, namun juga memperingatkan akan potensi negatifnya jika disalahgunakan. Beliau mengajak umat Islam untuk menjadi warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R., Efendi, D., Kurniawan, B. D., & Latief, H. (2019). *Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam untuk Indonesia Berkemajuan*. UMY Press.
- Aminudin. (1999). *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Pustaka Pelajar.
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2021). Cak Nur: Intelektual Cerdas Indonesia (Studi Biografi). *At-Ta'fikir*, 14(1), 99–105.
- Anwar, K. (2023). *Moderasi Beragama: Sebuah Diskursus Dinamika Keagamaan di Era Kontemporer*. K-Media.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Azmy, A. S., & Yusra, A. (2020). Pandangan Politik Jaringan Islam Liberal di Indonesia. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 1(2), 145–174.
- Daud, S. (2021). *Re-Orientasi Politik NU pada Masa Orde Baru: Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998*. Pusaka Media.
- Effendi, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Effendy, B. (2000). *(Re)politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Mizan.
- El Rahma, V. I. (2017). Sekular, Tradisionalis, dan Modernis: Sejarah, Karakteristik, dan Refleksinya di Indonesia. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 8(1), 56–74.
- Faridi. (2002). *Agama Jalan Kedamaian*. Ghalia Indonesia.

- Fautanu, I., Buhori, M., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. *Politicon*, 2(2), 87–112.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
- Janah, N. (2017). Nurcholish Madjid dan Pemikirannya: Diantara Kontribusi dan Kontroversi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 44–63.
- Jun, J. M. (2022). Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), 66–85.
- Karim, S. (2021). Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 119–134.
- Mahadika, F., & Sardini, N. H. (2019). Radikalisasi Isu Agama Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 131–140.
- Masamah, U. (2016). Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, dan Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia. *Fikrah*, 4(1), 1–19.
- Mulkhan, A. M. (1999). *Runtuhnya Mitos Politik Santri Abdul Munir Mulkhan*. Sipsess.
- Musyirifin, Z. (2016). Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pembaharuan Pendidikan Islam. *Madaniyah*, 6(2), 315–326.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam: Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani. *Jurnal Khitah*, 1(1), 1–25.
- Nurcholish, M. (2008). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Prayetno, B. (2017). Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(2), 1–14.
- Ratnasari, D., Panggabean, H., & Marta, R. F. (2021). Persepsi Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Anggota DPR pada Jabatan Strategis di DPR. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 33–60.
- Renjana, Q. C. (2016). *Falsafat Multikulturalisme Cak Nur*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*. Kencana.
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 145–156.
- Setiawan, J. (2019). Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralisme Agama dalam Konteks Keindonesiaan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1),

21–38.

Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar suku dan Bangsa*. KIK Press.

Supawi, M., & Arifinsyah, A. (2024). Makna Kalimatun Sawa terhadap Relevansi Wacana Inklusivisme Agama dan Realitas Peradaban Manusia, Butir Pemikiran Nurcholish Madjid. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 414–429.

Suwandi, E., Syamsul, uliyah S. A., Naba, K. T. R., & Kurniati. (2024). Etika Politik Islam Dalam Pemikiran Nurcholis Majid. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 175–181.

Syahidah, J. A. (n.d.). *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Duta Media Publishing.

Urbaningrum, A. (2004). *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*. Republika.

Yusuf, T., & Hidayah, M. (2023). Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 267–283.